



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung program kerja Bupati Kotawaringin Barat yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan visi **“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”** dan sebagai perwujudan dari bagian rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat. Visi tersebut dijabarkan dengan **Misi** sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olah raga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata;

Misi-misi tersebut dijabarkan ke dalam sasaran strategis SKPD dan setiap tahunnya mempunyai target. Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan program dan kegiatan yang ditampung dalam suatu Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja ini juga harus mengacu kepada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah program dan rencana kerja disusun dan anggaran/pagu indikatif ditentukan oleh tim anggaran maka Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD) pun dapat disusun untuk diusulkan kepada DPRD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Agar perencanaan kegiatan dan program lebih terarah dan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Menjabarkan rencana kerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktivitas dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022, terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Dengan adanya SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diharapkan target Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Tingkat Pemenuhan Persyaratan Penilaian KLA, Angka Prevalensi Peserta KB Aktif pada Pasangan Usia Subur (PUS), Presentase Program KKBPK yang terintegrasi di Kampung KB dapat tercapai dan terbina dengan baik.

Capaian Realisasi Fisik berdasarkan laporan TEPR ub. Juli 2021 telah mencapai 55,85%, sementara untuk realisasi keuangan hingga Juli 2021 baru mencapai 37,70% atau sebanyak Rp 3.075.069.465 dari total pagu keseluruhan berjumlah Rp 8.156.277.378.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK)
TAHUN ANGGARAN 2021

Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten : Kotawaringin Barat
Bulan : JULI 2021

No.	PROGRAM/KEGIATAN/URAIAN KEGIATAN	DANA DPA SKPD (Rp)	REALISASI		
			FISIK %	KEUANGAN	
				%	Rp
1	2	3	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.728.115.554	66,71	58,59	2.770.242.464
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	150.705.336	20,20	21,02	31.675.267
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	19.637.350	7,64	-	-
IV	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	73.124.260	8,92	-	-
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	96.310.240	84,85	46,58	44.860.874
VI	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	123.183.648	95,22	61,50	75.752.528
VII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.869.500.990	31,84	7,24	152.538.332
VIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	95.700.000	5,00	-	-
Jumlah		8.156.277.378	52,85	37,70	3.075.069.465



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang didukung dengan Perbup No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat baru terbentuk pada tahun 2017 yang sebelumnya merupakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Berikut adalah evaluasi pelaksanaan Renja 2019 dapat dilihat dalam Tabel. 2.1 pada lampiran.

Dengan adanya SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, diharapkan dapat mencapai target Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Tingkat Pemenuhan Persyaratan Penilaian KLA, Angka Prevalensi Peserta KB Aktif pada Pasangan Usia Subur (PUS), Presentase Program KKBPK yang terintegrasi di Kampung KB.

Adapun Target IKU yang diharapkan pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Target Renstra Perangkat Daerah

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2018 (Thn n-2)	2019 (Thn-1)	2020 (Thn n)	2021 (thn n+1)	2018 (Thn n-2)	2019 (Thn-1)	2020 (Thn n)	2021 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	64,110	64,530	64,530	
2	Kategori Kabuapten Layak Anak	-	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Inisiasi 338.25	Inisiasi >600	Pratama >600	Pratama	

Catatan : menurut perhitungan mandiri skor KLA mencapai 888 poin

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, tentu tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*strengthness*) maupun kelemahan (*weakness*) dalam organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang peningkatan kinerja meliputi:

1. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
2. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak .
3. Adanya 30 Organisasi Wanita, Adanya Kader KB yaitu PPKD dan Sub PPKBD.
4. Adanya Forum Anak pada Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat, Adanya Forum Peduli Perempuan dan Anak.
5. Adanya PIK-R di berbagai jenjang pendidikan se-Kabupaten Kotawaringin Barat dan Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat , Adanya Kelompok UPPKS.
6. Banyaknya potensi kelembagaan memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
7. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
8. Adanya dukungan Pimpinan Daerah yang sangat kuat untuk menjalankan visi, misi, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
9. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif.

Disamping kekuatan (*strengthness*) yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan (*weakness*) dalam lingkungan Dinas P3AP2KB, yaitu :

1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan daerah yang sejalan dengan tata kelola pemerintah.
2. Masih belum efektifnya forum koordinasi antar SKPD sehingga pembangunan program KKBPK dan pembangunan bidang lainnya belum bisa terwujud.
3. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi yang benar-benar akurat dan teruji.

Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*opportunities*) maupun ancaman (*threats*) dalam organisasi. Beberapa peluang yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain :

a. Peluang

1. Sebagai Kota dengan posisi yang strategis dimana Pangkalan Bun memiliki Pelabuhan Sungai, Pelabuhan Laut dan Bandar Udara dan berbagai perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kotawaringin Barat yang memiliki tenaga kerja yang banyak sehingga memiliki potensi bertambahnya mobilitas penduduk di Kab. Kobar.
2. Berkembangnya kunjungan wisata ke Kota Pangkalan Bun memungkinkan peningkatan Pendapatan Daerah.
3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat.

b. Ancaman

Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah :

Ancaman yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.



- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga tetapi dilihat dari jumlah kasus semakin meningkat tiap tahunnya.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki *smartphone* menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, bullying, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Pengembangan kelembagaan perlindungan anak berbasis masyarakat tingkat Desa dan Satgas PKDRT belum merata menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus pada perempuan dan anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- i. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang mengikuti Program KB belum maksimal.
- j. Masih adanya kasus pernikahan dini.
- k. Angka TFR masih dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah.
- l. Belum semua sekolah terbentuk PIK-R.
- m. Sistem Pengaduan/Pelaporan kasus perempuan dan anak masih bersifat manual.
- n. Program KKBPK masih belum dimengerti oleh masyarakat.
- o. Jumlah SDM setiap tahun berkurang dan tidak ada pengisian pada jabatan yang kosong sehingga kendala di proses kebijakan dan pelaksanaan program.

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal tersebut pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.



2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat



Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	90%	48.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	90%	48.000.000
Penyusunan Dokumen perangkat Daerah	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah yang disusun	3 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Dokumen perangkat Daerah	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah yang disusun	3 Dokumen	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	33 unit/thn	15.000.000



Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	40.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DP3AP2KB Kab. Kobar	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90%	5.565.269.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DP3AP2KB Kab. Kobar	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90%	5.565.269.000



Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP3AP2KB Kab. Kobar	Dokumen penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	5.536.269.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP3AP2KB Kab. Kobar	Dokumen penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	5.536.269.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DP3AP2KB Kab. Kobar	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DP3AP2KB Kab. Kobar	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Akuntansi	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Akuntansi	1 Dokumen	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	25.000.000



Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Bahan Tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	1 Laporan	1.000.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Bahan Tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	1 Laporan	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	2 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	2 Dokumen	1.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DP3AP2KB Kab. Kobar	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90%	55.250.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DP3AP2KB Kab. Kobar	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90%	55.250.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang diadakan	35 stel	19.250.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang diadakan	35 stel	19.250.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah SDM yang Mengikuti Bimbingan Teknis	3 orang/tahun	36.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah SDM yang Mengikuti Bimbingan Teknis	3 orang/tahun	36.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	DP3AP2KB Kab. Kobar	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90,0%	287.200.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DP3AP2KB Kab. Kobar	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90,0%	287.200.000



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah dan jenis Komponen Instalasi listrik/Penerangan yang disediakan	10 Jenis	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah dan jenis Komponen Instalasi listrik/Penerangan yang disediakan	10 Jenis	3.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	55 Jenis	62.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	55 Jenis	62.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	14 buah	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	14 buah	20.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah dan makan minum rapat yang diperlukan	12 bulan	3.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah dan makan minum rapat yang diperlukan	2 jenis	3.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan yang Disediakan	5 Jenis	45.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan yang Disediakan	5 Jenis	45.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Aktifitas rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan	27 OK	134.200.000 10.000.000 10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Aktifitas rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan	27 OK	134.200.000 10.000.000 10.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jenis Meubeler yang Disediakan	90%	192.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jenis Meubeler yang Disediakan	3Jenis	40.000.000
Pengadaan Mebel	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan	3 jenis	50.000.000	Pengadaan Mebel	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan	4 jenis	52.000.000



Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor	7 jenis	92.000.000	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor	1 jenis	50.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor	1 Jenis	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor	1 Jenis	50.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DP3AP2KB Kab. Kobar	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90%	290.350.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DP3AP2KB Kab. Kobar	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90%	290.350.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Surat/Paket yang Terkirim Jumlah Surat Kabar	10 paket 3 Jenis	1.000.000 5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Surat/Paket yang Terkirim Jumlah Surat Kabar	10 paket 3 Jenis	1.000.000 5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DP3AP2KB Kab. Kobar	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	79.350.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DP3AP2KB Kab. Kobar	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	79.350.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DP3AP2KB Kab. Kobar	Waktu Penyediaan Jasa administrasi Keuangan dan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	205.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DP3AP2KB Kab. Kobar	Waktu Penyediaan Jasa administrasi Keuangan dan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	205.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	DP3AP2KB Kab. Kobar	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90%	166.077.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	DP3AP2KB Kab. Kobar	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90%	166.077.200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	29 Unit	55.625.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	29 Unit	55.625.300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	5 unit	65.451.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	5 unit	65.451.900



Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	12 Unit	45.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	12 Unit	35.000.000
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar		0,025%	50.000.000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar		0,025%	50.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Persentase SKPD yang menerapkan ARG	60 orang	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Persentase SKPD yang menerapkan ARG	90%	50.000.000
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar		0,025%	425.000.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar		0,025%	50.000.000
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DP3AP2KB Kab. Kobar	Persentase SKPD yang menerapkan ARG	60 orang	100.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DP3AP2KB Kab. Kobar	Persentase SKPD yang menerapkan ARG	90%	50.000.000
Bawi Nyai				75.000.000	Bawi Nyai				75.000.000
GOW				250.000.000	GOW				250.000.000



PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DP3AP2KB Kab. Kobar			40.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DP3AP2KB Kab. Kobar			39.700.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			0,025%	25.000.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			0,025%	39.700.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Persentase Pelayanan korban Kekerasan terhadap Perempuan	100%	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Persentase Pelayanan korban Kekerasan terhadap Perempuan	90%	39.700.000
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar		0,025%	15.000.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar		0,025%	15.000.000
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang tersedia		15.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang tersedia	-	0
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak	DP3AP2KB Kab. Kobar			128.317.200	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak	DP3AP2KB Kab. Kobar			128.317.200
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Prosentase Partisipasi anak dalam peningkatan kualitas tumbuh kembang anak	2,07%	128.317.200	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Prosentase Partisipasi anak dalam peningkatan kualitas tumbuh kembang anak	2,07%	128.317.200



Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah anak yang terlibat dalam Forum Anak	50 Orang	20.000.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah anak yang terlibat dalam Forum Anak	50 Orang	20.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Peserta KHA	-	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Peserta KHA	-	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah orang yang melaksanakan Monev	31 org	35.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah orang yang melaksanakan Monev	31 org	35.000.000
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Orang yang mendapatkan pelatihan pengetahuan tentang tumbuh kembang anak	50 Orang	73.317.200	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Orang yang mendapatkan pelatihan pengetahuan tentang tumbuh kembang anak	50 Orang	73.317.200
Penguatan Jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Kader PATBM yang mendapatkan pelatihan	-	0	Penguatan Jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Kader PATBM yang mendapatkan pelatihan	-	0
PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	DP3AP2KB Kab. Kobar				PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	DP3AP2KB Kab. Kobar			
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Lembaga PATBM Desa/Kelurahan	21,27%	56.865.600	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Lembaga PATBM Desa/Kelurahan	21,27%	56.865.600
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Unit Kawasan ramah anak yang mendapatkan Alat Permainan Edukatif (APE)	-	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Unit Kawasan ramah anak yang mendapatkan Alat Permainan Edukatif (APE)	-	0



terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kawasan/Wilayah dan Fasilitas Publik yang ramah	2 kawasan	56.865.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kawasan/Wilayah dan Fasilitas Publik yang ramah	2 kawasan	56.865.600
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DP3AP2KB Kab. Kobar	Turunnya Angka Kekerasan terhadap Anak		327.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DP3AP2KB Kab. Kobar	Turunnya Angka Kekerasan terhadap Anak		200.000.000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan penyuluhan	90%	31.000.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan penyuluhan	90%	73.800.000
Penyerasian Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah siswa yang mendapatkan sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	-	0	Penyerasian Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah siswa yang mendapatkan sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	-	0
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Peserta yang Mendapat advokasi pergerakan dan penyuluhan KB	-	0	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Peserta yang Mendapat advokasi pergerakan dan penyuluhan KB	-	0
Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Modal Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan penyuluhan	-	0	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Modal Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan penyuluhan	-	0
		Jumlah RUMah Dataku di Kampung KB yang dibentuk	1 Buah	31.000.000			Jumlah RUMah Dataku di Kampung KB yang dibentuk	1 Buah	31.000.000



		Jumlah Pengurus Koalisi Kependudukan yang Mengikuti Pertemuan dan Monas Program KKBPK	-	0			Jumlah Pengurus Koalisi Kependudukan yang Mengikuti Pertemuan dan Monas Program KKBPK	-	0
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar		90%	296.000.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB Kab. Kobar		90%	900.445.950
Koordinasi, Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	DP3AP2KB Kab. Kobar			296.000.000	Koordinasi, Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Kegiatan Pelayanan KB		652.145.950
Pelatihan Petugas Pencatatan Pelaporan Program KKBPK Kecamatan	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Petugas Pendataan yang dilatih	76 Orang	82.500.000	Pelatihan Petugas Pencatatan Pelaporan Program KKBPK Kecamatan	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Petugas Pendataan yang dilatih	76 Orang	82.500.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana SIGA	7 Paket	210.000.000			Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD basis data yang dilatih	60 Orang	270.000.000
		Pembelian Internet	1 Buah	3.500.000			Pembelian Internet	360 Orang	28.116.000
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Frekuensi Kegiatan program KKBPK		0	0	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Frekuensi Kegiatan program KKBPK		267 Kegiatan	0
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	DP3AP2KB Kab. Kobar			2.000.000.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	DP3AP2KB Kab. Kobar			2.000.0000.000
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	DP3AP2KB Kab. Kobar	Prosentase Peserta KB Aktif	84,39%	341.551.550	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	DP3AP2KB Kab. Kobar	Prosentase Peserta KB Aktif	84,39%	341.551.550



Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah kegiatan advokasi program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	-	0	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah kegiatan advokasi program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	-	0
Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program KKBPK Sesuai Budaya Lokal	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Anak Sekolah yang Mendapatkan Pengetahuan PHRI	35 Orang	20.000.000	Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program KKBPK Sesuai Budaya Lokal	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Anak Sekolah yang Mendapatkan Pengetahuan PHRI	35 Orang	20.000.000
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Faskes yang Mendapatkan Sarana KIE Program KKBPK	54 Faskes	22.000.000	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Faskes yang Mendapatkan Sarana KIE Program KKBPK	54 Faskes	22.000.000
		Jumlah Kampung KB yang mendapatkan sarana KIE Program KKBPK	19 Kampung KB	43.929.950			Jumlah Kampung KB yang mendapatkan sarana KIE	19 Kampung KB	43.929.950
Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK	-	0	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK	-	0
Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	DP3AP2KB Kab. Kobar	Terlaksananya Pelaksanaan Harganas	-	0	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	DP3AP2KB Kab. Kobar	Terlaksananya Pelaksanaan Harganas	-	0
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DP3AP2KB Kab. Kobar	Tersedianya Operasional Balai	6 Balai	30.000.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DP3AP2KB Kab. Kobar	Tersedianya Operasional Balai	6 Balai	30.000.000
		Jumlah PUS yang mengikuti KB Modern	1800 orang	135.000.000			Jumlah PUS yang mengikuti KB Modern	1800 orang	135.000.000
		Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan	6 Kecamatan	55.116.000			Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan	6 Kecamatan	55.116.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DP3AP2KB Kab. Kobar			450.000.000					
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DP3AP2KB Kab. Kobar		2.520 kegiatan	450.000.000					
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di	DP3AP2KB Kab. Kobar	Prosentase Peserta KB Aktif	84,39%	1.120.248.450	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di	DP3AP2KB Kab. Kobar	Prosentase Peserta KB Aktif	84,39%	1.174.656.550



Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota				
Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Kegiatan pengendalian dan Pendistribusian alokan dan sarana penunjang pelayanan KB	40 Kegiatan	74.754.050	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Kegiatan pengendalian dan Pendistribusian alokan dan sarana penunjang pelayanan KB	40 Kegiatan	74.754.050
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP3AP2KB Kab. Kobar		24 Kegiatan	167.000.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP3AP2KB Kab. Kobar		24 Kegiatan	167.000.000
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB	11 unit	842.000.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB	14 unit	932.902.500
		Jumlah Saran Prasaran	3 Unit	75.000.000			Jumlah Saran Prasaran	3 Unit	75.000.000
		Jumlah Kendaraan antar Jemput	1 Unit	550.000.000			Jumlah Kendaraan antar Jemput	1 Unit	550.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan	7 Unit	177.569.000			Jumlah Alat Kesehatan	7 Unit	253.670.000
Biaya Penunjang Kegiatan Fisik	DP3AP2KB Kab. Kobar			39.431.000	Biaya Penunjang Kegiatan Fisik				54.232.500
Rapat Koordinasi			1 tahun	14.431.000	Rapat Koordinasi			1 tahun	29.232.500
Review Inspektorat			1 tahun	25.000.000	Review Inspektorat			1 tahun	25.000.000
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah PUS yang terlayani	-	0	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah PUS yang terlayani	-	0
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah PUS yang terlayani	1000 akseptor	36.494.400	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah PUS yang terlayani	1000 akseptor	36.494.400
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	DP3AP2KB Kab. Kobar	Prosentase Peserta KB Aktif	84,39%	88.200.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	DP3AP2KB Kab. Kobar	Prosentase Peserta KB Aktif	84,39%	88.200.000



Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah kader kampung KB yang terbina	16 kali	88.200.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah kader kampung KB yang terbina	16 kali	88.200.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	DP3AP2KB Kab. Kobar			422.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	DP3AP2KB Kab. Kobar			422.000.000
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah PIK R yang Mengikuti Lomba Duta Generasi Remaja		60.000.000	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah PIK R yang Mengikuti Lomba Duta Generasi Remaja		60.000.000
Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah PIK R yang Mengikuti Lomba Duta Generasi Remaja	10 Kelaompok PIK R	60.000.000	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah PIK R yang Mengikuti Lomba Duta Generasi Remaja	10 Kelaompok PIK R	60.000.000
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di Kampung KB	DP3AP2KB Kab. Kobar	Terbentuknya PIK R di Kampung KB	-	0	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di Kampung KB	DP3AP2KB Kab. Kobar	Terbentuknya PIK R di Kampung KB	-	0
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP3AP2KB Kab. Kobar		16%	312.000.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP3AP2KB Kab. Kobar	Tersedianya Alat Permainan Edukasi (APE) Kit Siap Nikah Anti Stunting	16%	312.000.000
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	DP3AP2KB Kab. Kobar	Tersedianya Alat Permainan Edukasi (APE) Kit Siap Nikah Anti Stunting	-	0	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah PIK R yang Mengikuti Lomba Duta Generasi Remaja	-	0



		Tersedianya Alat Permainan Edukasi (APE) Stunting Kit	11 Lokus Stunting	198.000.000			Tersedianya Alat Permainan Edukasi (APE) Stunting Kit	11 Lokus Stunting	198.000.000
		Tersedianya alat Permainan Edukatif Genre Kit (Lengkap)	-	0			Tersedianya alat Permainan Edukatif Genre Kit (Lengkap)	-	0
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	DP3AP2KB Kab. Kobar	Pembinaan dan Pembimbingan PIK R	10 Kelompok PIK R	30.000.000	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	DP3AP2KB Kab. Kobar	Pembinaan dan Pembimbingan PIK R	10 Kelompok PIK R	30.000.000
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3AP2KB Kab. Kobar	Tersedianya Operasional Penanganan Stunting	12 Lokus Stunting	84.000.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3AP2KB Kab. Kobar	Tersedianya Operasional Penanganan Stunting	12 Lokus Stunting	84.000.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP3AP2KB Kab. Kobar			50.000.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP3AP2KB Kab. Kobar			50.000.000
Sosialisasi dan Promosi tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah UPPKS/UPPKA yang mengikuti sosialisasi		0	Sosialisasi dan Promosi tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	DP3AP2KB Kab. Kobar	Jumlah UPPKS/UPPKA yang mengikuti sosialisasi	-	0



Peningkatan kapasitas Mitra dan Organisasi dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balitra (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	DP3AP2KB Kab. Kobar	Terbentuknya Kelompok Tribina dan PPPKS di 6 Kecamatan	150 Orang	50.000.000	Peningkatan kapasitas Mitra dan Organisasi dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balitra (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	DP3AP2KB Kab. Kobar	Terbentuknya Kelompok Tribina dan PPPKS di 6 Kecamatan	150 Orang	50.000.000
--	---------------------	--	-----------	------------	--	---------------------	--	-----------	------------



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan.

Prioritas pembangunan yang sesuai dengan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu :

- Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olah raga;
- Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tentram dan dinamis;

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan suatu komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berdasarkan dimaksud tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai leading sektor untuk mengatasi berbagai permasalahan berkaitan dengan hal tersebut. Dibutuhkan kerja keras Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan program prioritas tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup visi misi tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra). Sedangkan program disajikan sebagai strategi relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Tujuan adalah suatu hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang menggambarkan arah strategis dan meletakkan kerangka prioritas pencapaian misi. Tujuan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi berdasarkan analisis lingkungan serta faktor-faktor penentu keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan tersebut di atas adalah menyangkut hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran atau objektifitas organisasi merupakan tingkat capaian yang diharapkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sebagai penjabaran tujuan, dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam waktu tahunan. Pada kondisi ideal penetapan sasaran akan sangat baik apabila sasaran ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, serta jangka waktu pencapaiannya jelas.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan kemudian dirumuskan cara mencapai tujuan dan sasaran (strategis) berupa serangkaian kebijakan dan program. Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya.

Tujuan :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan;
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK);
4. Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak;
5. Penguatan Advokasi dan KIE tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga;
6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB;
7. Pembangunan Keluarga, yang dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Sasaran :

1. Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraan KB;
2. Meningkatnya Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak;



3. Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Hak Perempuan;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan kebutuhan Aparatur;



Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja DP3AP2KB Kab. Kotawaringin Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
				Awal	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Pelayanan KB dan Kemitraaan KB	Prosentase Program KKBPk yang terintegrasi di Kampung KB Jumlah Kampung KB yang terintegrasi / Jumlah Seluruh Kampung KB x 100	%	21	21	31	52	52	
	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak	Tingkat Pemenuhan Pesyaratan Penilaian KLA Rata-rata Prosentase Pemenuhan persyaratan KLA di Seluruh SKPD	Skor	570	600	700	800	800	
	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Peran serta Perempuan dalam Pembangunan dan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan / Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki x 100	%	91,66	91,76	91,86	91,96	91,96	



Perlindungan Hak Perempuan								
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kebutuhan Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Daerah	%	90	90	90	95	95	
	Total Ketersediaan Administrasi Perkantoran / Total Kebutuhan Adminitrasi Perkantoran x 100							
	Nilai Sakip Perangkat Daerah	POIN	C	CC	B	B	B	
	Range Nilai SAKIP							



BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 yang merupakan tujuan dan sasaran dari Renstra Tahun 2017 - 2022. Program dan kegiatan disusun berdasarkan :

1. Penjabaran visi dan misi Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Bab sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 8 (delapan) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
3. Program Perlindungan Perempuan;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
5. Program Perlindungan Anak;
6. Program Pengendalian Penduduk;
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);

Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut sebanyak 22 Kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
9. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
10. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
11. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;



13. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
14. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
15. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;
17. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
18. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;
19. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB
20. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
21. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
22. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 direncanakan berjumlah 8 Program dan 22 kegiatan Tahun 2022 total anggaran/pagu indikatif sebesar Rp. **10.053.329**



BAB. V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisikan: tujuan, sasaran, kebijakan dan program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tahun 2022.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2022. Sebagai tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022 dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022 ini dibuat dan diharapkan dapat menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga program dan kegiatan tersebut dapat dicapai secara baik dan maksimal.

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan dan perbaikan penyusunan rencana kerja di masa yang akan datang.

Pangkalan Bun, Juli 2021

Plt. KEPALA DINAS P3AP2KB

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**FITRIYANA, ST
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750903 20003 2 005**

